

PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Penetapan Pengadilan Agama Manna Nomor 0024/Pdt.P/2018/PA.Mna)

Zulvayana

Pengadilan Agama Manna Bengkulu Selatan
Email: zulvayana.iainbengkulu@gmail.com

Abstract: This study aims to determine the legal considerations in rejecting the application of marriage dispensation in the Manna Religion Court and to find out the determination of the Manna Religion Court Number 0024 / Pdt.P / 2018 / PA.Mna in accordance with the elements of legal justice, legal certainty and legal benefits. Based on the results of the research, it is known that the legal consideration of the refusal of marriage dispensation applications because the Petitioners in the trial only submitted 1 (one) witness so that the applicants could not prove the argument of their petition and in court found a fact that the children of the applicant had been married before the application for marriage dispensation was tried. The cause of rejection of marital dispensation of minors due to actions that are contrary to Article 7 of Act Number 1 of 1974. Determination of the Manna Religion Court Number 0024 / Pdt.P / 2018 / PA.Mna is in accordance with the elements of justice, certainty and legal benefit because in the Determination of the application for marriage dispensation is guided by Law Number 1 of 1974. The results of this study, are expected to be a deterrent effect for the community and the Office of Religious Affairs, so as not to violate Law Number 1 Year 1974 by marrying minors without the Religion Court dispensation. The rejection of the granting of marriage dispensation in substantial justice will be difficult to be felt by the applicants, but in order to enforce procedural justice, the stipulation of marital dispensation creates order in recording marriage.

Keywords: *Dispensation, Underage Marriage, Law Number 1 Year 1974*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum dalam menolak permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Manna dan untuk mengetahui penetapan Pengadilan Agama Manna Nomor 0024/Pdt.P/2018/PA.Mna sesuai dengan unsur keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pertimbangan hukum penolakan permohonan dispensasi kawin karena para Pemohon dalam persidangan hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi sehingga para pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya dan di persidangan ditemukan sebuah fakta bahwa anak para pemohon telah dinikahkan sebelum permohonan dispensasi kawin disidangkan. Penyebab penolakan dispensasi kawin anak di bawah umur karena adanya perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penetapan Pengadilan Agama Manna Nomor 0024/Pdt.P/2018/PA.Mna sudah sesuai dengan unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum karena dalam Penetapan permohonan dispensasi kawin berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat menjadi efek jera bagi masyarakat dan Kantor Urusan Agama, sehingga tidak melakukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan menikahkan anak di bawah umur tanpa dispensasi Pengadilan Agama. Penolakan pemberian dispensasi kawin secara keadilan substansial akan sulit dirasakan oleh para pemohon, tetapi untuk menegakkan keadilan prosedural, penetapan dispensasi kawin menciptakan ketertiban pencatatan pernikahan.

Kata Kunci: *Dispensasi, Perkawinan di Bawah Umur, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*

Pendahuluan

Wilayah hukum Pengadilan Agama Manna, Kabupaten Kaur, Bengkulu Selatan, dan Seluma dalam 3 tahun terakhir sejak tahun 2015 sampai dengan 2018 perkara dispensasi kawin telah menjadi fenomena tersendiri, karena begitu banyak perkara masuk terkait dispensasi kawin di bawah umur. Pada tahun 2015 terdapat 34 perkara (31 perkara yang dikabulkan, 2 perkara dicabut, dan 1 perkara gugur). Di tahun 2016 terdapat 67 perkara (59 perkara yang dikabulkan, 2 perkara ditolak, 4 perkara dicabut dan 2 perkara gugur). Di tahun 2017 terdapat 84 perkara (74 perkara yang dikabulkan, 2 perkara ditolak, 4 perkara dicabut, 3 perkara gugur, dan 3 perkara dicoret). Sedangkan di tahun 2018 sampai bulan Maret terdapat 31 perkara (28 perkara dikabulkan, 1 perkara di tolak, dan 2 perkara gugur). Hal ini menunjukkan bahwa pergaul-

an anak-anak usia dini sudah sangat mengkhawatirkan. Dari beberapa perkara yang masuk, para orang tua (pemohon) sudah tidak bisa lagi mencegah anak pemohon untuk menunda pernikahannya.

Perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Manna setiap tahun mengalami peningkatan secara signifikan, dari tahun 2015 sampai tahun 2017 perkara dispensasi kawin menduduki urutan keempat setelah perkara cerai gugat, cerai talak dan isbat nikah. Sedangkan sampai dengan bulan Maret tahun 2018 perkara dispensasi kawin naik peringkat menjadi urutan ketiga setelah cerai gugat dan cerai talak. Dari perkara dispensasi yang diterima di Pengadilan Agama Manna tersebut hampir semua pasangan calon pengantin telah melakukan hubungan layaknya suami istri sebelum menikah dan kebanyakan calon istri sudah hamil sebelum menikah.

Dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua (pemohon), pada hakikatnya bukan karena kedua calon mempelai sudah siap lahir batin untuk menjalankan kehidupan berumah tangga, tetapi lebih kepada karena pemohon malu. Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan bahkan sudah hamil sebelum menikah, sehingga memaksa para orang tua menikahkan anaknya segera padahal anak-anak tersebut belum cukup umur.

Walaupun demikian, masih ada beberapa perkara yang diajukan oleh Pemohon karena alasan anak Pemohon dan calon istri/suami memang benar-benar sudah saling cinta (sudah sangat dekat), telah berpacaran/ bertunangan lama sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang akan melanggar norma bukan dikarenakan sudah berhubungan layaknya suami istri yang sah atau bahkan calon istri sudah hamil, tetapi perkara yang seperti ini hanya sedikit sekali ditemukan di wilayah hukum Pengadilan Agama Manna.

Perkara dispensasi kawin, majelis hakim menjadi dilema dalam memutuskan perkara tersebut untuk mengabulkan atau menolak permohonan tersebut karena di satu sisi calon istri telah hamil tetapi di sisi lain, anak pemohon baik calon suami ataupun calon istri masih belum cukup umur sehingga masih perlu untuk didampingi oleh orang tua dan juga orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Sebagaimana dalam Undang-Undang tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat pendampingan dari perlakuan eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, dan menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.¹

Pengadilan Agama Manna sebagai bagian atau perpanjangan tangan mahkamah agung yang bertugas menerima, memeriksa, dan mengadili perkara-perkara tertentu, dalam menangani masalah dispensasi nikah tetap mengacu pada proses dan prosedur perundang-undangan yang berlaku. Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat dari tahun ke tahun semakin banyak remaja yang ingin menikah muda dan mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama. Oleh karena itu masalah dispensasi nikah perlu mendapat perhatian khusus untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan dalam rangka penegakan hukum.

Mengenai penetapan Pengadilan Agama Manna tentang dispensasi kawin, pada umumnya dikabulkan oleh Majelis Hakim, tetapi penulis tertarik un-

tuk meneliti perkara yang berbeda, yaitu permohonan dispensasi kawin yang oleh Pengadilan Agama Manna yang ditolak diantaranya perkara Nomor 0003/Pdt.P/2016/PA.Mna, perkara Nomor 0006/Pdt.P/2016/Pdt.P/2016/PA.Mna dan perkara Nomor 0024/Pdt.P/2018/PA.Mna.

Berdasarkan ketiga perkara tersebut, penulis mengambil fokus 1 perkara yaitu perkara Nomor 0024/Pdt.P/2018/PA.Mna sebagai bahan penelitian karena kedua calon suami dan calon istri kurang umur untuk menikah, dan faktor penyebab diajukan permohonan dispensasi kawin sama dengan yang lainnya karena keadaan calon istri telah hamil, sehingga mendesak untuk dinikahkan, namun permohonan dispensasi kawin tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Manna, padahal pada umumnya penetapan permohonan dispensasi kawin yang calon istrinya telah hamil dan calon suami telah memiliki pekerjaan dan penghasilan menjadi pertimbangan Hakim bahwa permohonan dispensasi kawin dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dengan demikian, diharapkan penulis dapat menemukan alasan yang lebih komprehensif tentang penolakan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Manna.

Rumusan Masalah

- Bagaimana pertimbangan hukum penetapan Pengadilan Agama Manna Nomor 0024/Pdt.P/2018/PA.Mna dalam penolakan dispensasi kawin anak di bawah umur?
- Apakah penetapan pengadilan Manna Nomor 0024/Pdt.P/2018/PA.Mna sesuai dengan unsur keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum?

Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui pertimbangan hukum penetapan Pengadilan Agama Manna Nomor 0024/Pdt.P/2018/PA.Mna dalam penolakan dispensasi kawin anak di bawah umur.
- Untuk mengetahui penetapan pengadilan Manna Nomor 0024/Pdt.P/2018/PA.Mna sesuai dengan unsur keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan studi kasus. Menurut Maman penelitian deskriptif ialah sebuah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan gejala sosial, politik, ekonomi, dan budaya.²

¹Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 12

²Maman. *Metodologi Penelitian Agama : Teori dan Praktik*. (PT. Raja Grafindo: Jakarta, 2006), h. 29

Menurut Sutopo studi kasus tunggal adalah penelitian hanya dilakukan pada satu sasaran (satu lokasi studi atau satu subjek). Jumlah sasaran (lokasi studi) tidak menemukan suatu penelitian berupa studi kasus tunggal atau ganda, kalau sasaran studi tersebut memiliki karakteristik yang sama atau seragam maka penelitian tersebut tetap merupakan studi kasus tunggal. Terpancang artinya terfokus, maksudnya dalam penelitian ini memfokuskan pada suatu masalah yang sudah ditetapkan sebelum peneliti terjun ketempat penelitian. Disebut tunggal karena penelitian ini merupakan penataan secara rinci aspek-aspek tunggal.³

Kerangka Teori

Untuk menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa referensi yang berkaitan dengan pembahasan tesis ini. Adapun referensi – referensi yang dimaksud adalah diantaranya:

Perkawinan dalam Islam merupakan perjanjian suci, bahkan sebelum melakukan perkawinan diajarkan pula beberapa prasarat agar seseorang mengetahui dengan benar hakikat sebuah perkawinan.⁴ Dalam sebuah pernikahan batas usia sudah ada batas umurnya untuk dapat melangsungkan pernikahan, baik diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 tentang Perkawinan yang menerangkan Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Bahkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun, calon isteri 16 tahun. Dan pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa: “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.” Undang-Undang Perkawinan memberikan peluang apabila dalam keadaan yang sangat memaksa, perkawinan di bawah umur dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setempat dengan surat pengantar dari KUA, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) tentang Perkawinan.

Roihan A. Rasyid berpendapat bahwa dispensasi kawin adalah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup

umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai 16 (enam belas) tahun.⁵

Dispensasi nikah adalah permohonan pengesahan pernikahan yang dilangsungkan, di mana para calon mempelai atau salah satu calon mempelai belum mencapai batas usia minimal yaitu batas minimal sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Permohonan dispensasi nikah dari pihak pemohon, berkaitan erat dengan pengadilan yang memiliki hak untuk menolak atau menerima permohonan dispensasi nikah apabila alasan yang diajukan tidak didukung dengan adanya alasan yang kuat. Untuk itu, kebijaksanaan dan kehati-hatian dari pihak pengadilan sangat berperan dalam menerima permohonan dispensasi nikah yang sesuai dengan alasan yang kuat, sehingga jumlah laju permohonan dispensasi nikah dapat ditekan. Dengan demikian penetapan dari Pengadilan Agama mengenai dispensasi nikah sangat penting untuk menjalankan proses aturan hukum demi kelangsungan pernikahan anak di bawah umur.

Perkawinan pada anak di bawah umur bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Praktik ini sudah lama terjadi dengan begitu banyak pelaku. Tidak di kota besar tidak di pedalaman. Sebabnya pun bervariasi, karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, juga karena hamil terlebih dahulu. Namun dengan adanya dispensasi kawin bagi anak di bawah umur tentu bertolak belakang dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Setiap anak mempunyai hak untuk hidup pada masanya. Perkawinan di bawah umur tersebut tidaklah sedikit yang sudah terjadi di semua wilayah. Hal tersebut tentu bukan semata-mata sengaja terjadi. Akan tetapi ada suatu faktor tertentu yang mendesak untuk dilaksanakannya perkawinan di bawah umur tersebut.

Pasal 15 KHI serta Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.” Namun dalam ketentuan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan dalam hal penyimpangan terhadap Pasal 1 ayat (1) ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.⁶

Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Seorang calon mempelai

³Sutopo, HB. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Sebelas Maret University Press: Surakarta, 2006), h. 112. diakses tanggal 01 Februari 2018

⁴Najmuddin Zuhdi dan Elvi Na'imah. Studi Islam 2. (Surakarta: LPID, 2010), h. 104

⁵Roihan A. Rasyid. Hukum Acara Peradilan Agama. (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1998). h. 32.

⁶Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat 1 dan 2 / Undang Undang No-tahun 1974

yang akan melangsungkan pernikahan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendaknya melangsungkan perkawinan dengan mendapat dispensasi nikah dari pengadilan agama.

Permohonan dispensasi nikah bagi mereka yang belum mencapai umur 19 tahun dan 16 calon suami dan istri tersebut diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya.⁷ Sementara itu dalam agama Islam, agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, tidak memberikan batasan umur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang perkawinan. Agama Islam menetapkan ukuran kedewasaan seseorang apabila ia telah baligh. Usia baligh seseorang tentu berbeda-beda. Untuk wanita biasanya ditandai dengan datangnya haid (menstruasi), sedangkan untuk pria, ditandai dengan mimpi basah.

Dispensasi perkawinan adalah kelonggaran atau keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon suami istri yang akan melangsungkan pernikahan. Akan tetapi dalam pemberian izin dispensasi pernikahan dari Pengadilan Agama, hakim berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu, putusan hakim bisa memberikan izin dispensasi pernikahan atau menolak dispensasi nikah yang diajukan pemohon.

Pembahasan

1. Dispensasi Kawin Anak di Bawah Umur

a. Dasar Hukum dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Kawin di bawah umur

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H selaku hakim di Pengadilan Agama Manna, beliau mengatakan bahwa dasar hukum dalam memutuskan perkara dispensasi kawin secara umum adalah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam dan sumber hukum lainnya yang berhubungan dengan sumber hukum formil dan Materil Peradilan Agama.⁸

Kemudian bapak Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I., mengatakan mengenai terkait perkara yang ditolak ada pertimbangan hukum lainnya dengan tergantung alasannya, khusus untuk perkara 0024/Pdt.P/2018/

PA.Mna dasar hukum yang digunakan selain ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 digunakan juga ketentuan Pasal 169 HIR/306 Rbg/KUH Perdata Pasal 1905 dijelaskan bahwa “1 (satu) orang saksi, tidak bisa dianggap menjadi saksi (unus testis nulus testis)” dan juga pendapat hakim bahwa adanya perbuatan yang betentangan dengan Undang-Undang yang dilakukan oleh para Pemohon yang telah menikahkan calon pengantin sebelum mendapatkan penetapan dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama, sedangkan pernikahan tersebut dihadiri oleh pegawai KUA padahal secara resmi KUA telah melampirkan surat penolakan pernikahan nomor 005/KK.07.06.14/1/2018 tanggal 26 Januari 2018 sebagai syarat mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.⁹

Pendapat ini juga dipertegas oleh ibu Sudiliharti, S.H.I yang menyatakan bahwa apabila seseorang ingin melakukan pernikahan dan belum memenuhi batas ketentuan usia pernikahan, maka tidak bisa dilangsungkan pernikahan kecuali mendapatkan izin dispensasi nikah dari lembaga yang berwenang dalam hal ini Pengadilan Agama, sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah ke pengadilan agama atau pejabat lain yang berwenang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.¹⁰

Dispensasi ini berfungsi sebagai legalitas kedewasaan dan persyaratan untuk melakukan pernikahan bagi mereka yang secara undang-undang belum diperkenankan melakukan pernikahan, berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 mengenai ketentuan batas usia pernikahan, ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 12 dan Pasal 13 mengenai ketentuan prosedur pemahaman dispensasi nikah di Pengadilan Agama bagi yang usianya belum mencapai usia minimal seseorang boleh melakukan pernikahan menyatakan sebagai tersebut :

Pasal 12:

- a. Pernikahan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai;
- b. Seseorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat 2,3,4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.¹¹

⁷Mohd. Idris Ramulyo. Hukum Perkawinan Islam Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam. (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2007), h.183

⁸Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.selaku hakim di Pengadilan Agama Manna, tanggal 10 April 2018

⁹Hasil wawancara dengan Bapak Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I selaku hakim di Pengadilan Agama Manna, tanggal 11 April 2018

¹⁰Hasil wawancara dengan Ibu Sudiliharti, S.H.I selaku hakim di Pengadilan Agama Manna, tanggal 16 April 2018

¹¹Pasal 12, Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975

Pasal 13:

- a. Apabila seorang suami belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.
- b. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya;
- c. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan;
- d. Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.

Dasar Hukum Hakim selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa Pengadilan Agama berkedudukan di Kabupaten atau Kota daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten dan Kota.¹² Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Manna.¹³

Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa Pengadilan Agama berkedudukan di Kabupaten atau Kota daerah hukum Penggugat maupun Pemohon. Dalam artian bahwa seseorang boleh melakukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Manna, berdasarkan bukti kartu tanda penduduk (KTP) yang telah dikeluarkan oleh dinas catatan sipil dan Kependudukan Kabupaten Manna, maka permohonan Pemohon patut diterima berdasarkan kewenangan relatif Pengadilan Agama Manna.

Mengenai keabsahan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Manna Tahun 2015 majelis hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama mengenai kewenangan absolut menyatakan bahwa Pengadilan Agama Manna berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara permohonan dispensasi nikah berdasarkan materi hukum perkara tingkat pertama di Peradilan Agama.¹⁴

Mengenai dasar hukum pemberian dispensasi perkawinan, sebagian besar para pemohon tidak mengetahuinya. Hal ini diketahui dari hasil wawancara dengan pemohon 1 dan pemohon 2, yaitu: pemohon I dan pemohon II tidak mengetahui dasar hukum dispensasi kawin tetapi setelah permohonan dispensasi kawin ditolak, pemohon I dan pemohon II mengetahui bahwa apabila telah menikahkan anak pemohon I dan anak pemohon II sebelum mendapatkan dispensasi kawin maka dispensasi kawin tidak perlu diajukan lagi.¹⁵

Berdasarkan ketentuan tersebut menjelaskan kewenangan Pengadilan Agama Manna, dalam halnya mengenai perkara perdata Islam salah satunya permohonan dispensasi kawin maka salah satu perkara yang ditangani Pengadilan Agama Manna dalam hal ini mengenai permohonan dispensasi nikah patut diterima, berdasarkan kewenangan absolut Pengadilan Agama Manna.

Atas permohonan pemohon majelis hakim telah memeriksa dan mempertimbangkan bahwa untuk mendapatkan izin dispensasi nikah di Pengadilan Agama Manna. Adapun beberapa persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya, foto kopi identitas pemohon, kutipan akta nikah pemohon, kartu keluarga pemohon, akta kelahiran anak pemohon, surat keluarga calon besan, surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan pernikahan, surat penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama di Kabupaten wilayah hukum Pengadilan Agama Manna dan persyaratan tersebut sudah dipenuhi oleh Pemohon dan sudah dicocokkan dan sudah sesuai dengan aslinya, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 3, Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, pasal 1 huruf a dan huruf f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai, bukti-bukti yang tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya keterangan yang diperoleh dari calon suami maupun calon istri, calon besan pemohon, serta saksi yang telah dihadirkan di depan persidangan juga telah menguatkan dalil Permohonan dispensasi nikah.

Mejelis hakim dalam memberikan izin dispensasi nikah kepada pemohon untuk bisa menikahkan anaknya meskipun usia anaknya tersebut masih dibawah ketentuan usia pernikahan, dalam memutuskan maupun menetapkan suatu perkara harus mempunyai dasar hukum yang dipakai sebagai dasar untuk mengambil suatu keputusan maupun penetapan, agar

¹²Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

¹³Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

¹⁴Mardani. Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 53

¹⁵Hasil wawancara dengan Halidi bin Saidi dan Biman bin Bamim selaku pemohon dispensasi pernikahan di Pengadilan Manna

tidak merugikan pihak yang berperkara, majelis hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁶

Menurut ketentuan undang-undang yang mengatur tentang seseorang boleh melakukan pernikahan, majelis hakim pada dasarnya tidak bisa memberikan izin karena anak pemohon untuk menikah, disebabkan anak pemohon usianya masih dibawah ketentuan batas usia pernikahan, akan tetapi pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama atau pejabat lain yang berwenang ditunjuk oleh salah kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.¹⁷ Meskipun dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, memberikan kemudahan terhadap seseorang yang ingin menikah akan tetapi usianya masih dibawah batas ketentuan usia pernikahan maka dapat meminta izin dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

Majelis hakim dalam memberikan izin dispensasi nikah di Pengadilan Agama Manna harus mengedepankan metode masalah mursalah, sebagai alat legalitas untuk mengesahkan status hukum, agar masalah mursalah bisa dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menggali sebuah hukum, dalam halnya mengenai dispensasi nikah syarat-syarat tersebut antara lain:

- a. Masalah mursalah seharusnya sesuai dengan syarat syariat dalam persyariatan sehingga tidak meniadakan pokok-pokok syariat dan juga tidak bertentangan dengan nash maupun dalil-dalil yang qat'i jadi, jika dalam sesuatu hal yang harus direalisasikan, akan tetapi secara nyata kemaslahatan tersebut bertentangan dan dapat merobohkan nilai-nilai agung al-maqasid al-syari'ah, maka masalah tersebut tidak bisa dijadikan sebuah dalil dan metode untuk menggali hukum Islam.
- b. Masalah seharusnya berupa masalah yang rasional (masuk akal) masalah yang disini adalah masalah yang sudah pasti, bukan berupa masalah yang masih diragukan dan memunculkan ketidakjelasan.
- c. Masalah merupakan manfaat yang dapat dirasakan oleh mayoritas umat secara umum, bukan masalah yang hanya dapat dirasakan oleh sebagian syarat yang ketiga inilah meminimalisir kesalahan yang dilakukan oleh pihak tertentu yang menjadi masalah mursalah sebagai penggalian hukum untuk meligimasi kepentingan sendiri saja.¹⁸

¹⁶Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁷Pasal 7 ayat (2) Undang – undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁸Wahbah Zuhailiy. Ushul Fiqh al- Islamiy. (Dimsyah, Dar al- Fikr, 1998), h. 799

Sebagaimana dalam kaidah fikih yang artinya menyatakan sebagai berikut, mencegah kerusakan harus didahulukan dari pada pencapaian nilai-nilai maslahat berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa tujuan perkawinan sangatlah mulia akan tetapi apabila tujuan yang sangat mulia tersebut tidak disegerakan padahal antara calon suami maupun calon istri sudah siap membangun bahtera rumah tangga meskipun usia mereka belum mencapai usia ideal seseorang boleh melakukan pernikahan, akan menimbulkan fitnah maupun akan menimbulkan perbuatan yang tidak diinginkan di kemudian hari.

b. Pertimbangan Hukum dalam memutuskan perkara Nomor 0024/Pdt.P/2018/PA.Mna

Pertimbangan Hukum dalam penetapan dispensasi kawin perkara Nomor 0024/Pdt.P/2018/PA.Mna, antara lain:¹⁹

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin ini disebabkan anak Pemohon I yang bernama Ropian Pranata bin Halidi akan menikah dengan anak Pemohon II yang bernama Rinda Arsuci binti Biman, tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama, karena anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum memenuhi batas umur minimal untuk melaksanakan pernikahan, sesuai Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat (P.1 s/d P.8) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan fotokopi dari akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti-bukti surat tersebut memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan foto kopi surat keterangan atas nama Pemohon I dan Pemohon II, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Manna, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Manna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 dan P.4 terbukti bahwa Pemohon I telah menikah dan berumah tangga dengan seorang perempuan yang bernama Juti Julah Seni, sedangkan Pemohon II te-

¹⁹Penetapan Pengadilan Agama Manna Nomor 0024/Pdt.P/2018/PA.Mna

lah menikah dengan seorang perempuan bernama Ernawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 dan P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga, terbukti bahwa Ropian Pranata bin Halidi merupakan anggota keluarga dari Pemohon I, sedangkan Rinda Arsuci binti Biman merupakan anggota keluarga Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 terbukti anak Pemohon I yang bernama Ropian Pranata bin Halidi, lahir pada tanggal 17 September 2000, dengan demikian benar bahwa anak Pemohon I tersebut belum berusia 19 tahun sehingga masih dibawah umur yang belum diizinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 terbukti bahwa dari pernikahan Pemohon II dan isterinya tersebut diatas telah lahir seorang anak yang bernama Rinda Arsuci binti Biman pada tanggal 25 November 2002, dengan demikian benar bahwa anak Pemohon II tersebut belum berusia 16 tahun sehingga masih dibawah umur yang belum diizinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak perempuan sudah mencapai usia 16 tahun;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saksi-saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya ternyata bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 RBg,;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi, sehingga tidak dapat dianggap sebagai saksi (unus testis nulus testis);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan ditemukan sebuah fakta hukum yang ternyata anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah dinikahkan sebelum perkara ini disidangkan tepatnya pada tanggal 17 Februari 2018, yang mana hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun secara de jure anak Pemohon I dan anak Pemohon II masih dibawah umur untuk melaksanakan pernikahan, namun secara

de facto anak-anak para Pemohon telah dinikahkan sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna yang terdiri dari Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sudiliharti, S.H.I dan Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Dansahari, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II;

Sebelum ketua majelis menetapkan penetapan, ketua majelis mempunyai pertimbangan-pertimbangan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak. Yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim adalah sebagai berikut:²⁰

1. Pemohon

Majelis hakim di dalam persidangan akan meneliti apakah orang yang mengajukan perkara permohonan dispensasi tersebut berhak mengajukan atau tidak.

2. Alasan

Di Persidangan Majelis Hakim menanyakan alasan anak pemohon, kemudian Majelis Hakim meneliti alasan anak permohonan dengan pemohon di surat permohonannya, apakah alasan anak pemohon dengan pemohon ada persamaan atau tidak.

²⁰Wawancara dengan Bapak Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H selaku hakim di Pengadilan Agama Manna, tanggal 11 April 2018

3. Ada larangan perkawinan atau tidak

Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan terdapat halangan atau tidak, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan.

1. Pembuktian

Pembuktian berfungsi untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya. Pemohon diharuskan mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi.

2. Pemberian dispensasi kawin sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum positif di Indonesia

Pertimbangan hukum majelis hakim menolak dispensasi kawin Pemohon adalah:²¹

Pendapat hakim bahwa adanya unprofessional conduct oleh pegawai KUA yang telah menghadiri dan membantu melangsungkan pernikahan anak para Pemohon pada tanggal 17 Februari 2018 sebelum permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama disidangkan pada tanggal 26 Februari 2018, padahal secara resmi KUA telah melampirkan surat penolakan pernikahan nomor 005/KK.07.06.14/1/2018 tanggal 26 Januari 2018 sebagai syarat mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.

Kemudian bapak Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I, menambahkan mengatakan yang menjadi pertimbangan hukum Hakim menolak dispensasi kawin adalah:²²

Saksi yang diajukan hanya satu orang, padahal “satu orang saksi, tidak bisa dianggap menjadi saksi (unus testis nulus testis)” dan saksi tersebut tidak menguatkan dalil-dalil permohonan untuk dibulkannya permohonan dispensasi kawin tetapi mengungkap fakta bahwa calon pengantin telah dinikahkan dan hal tersebut diakui oleh pemohon, dan pengakuan di persidangan itu sempurna (mengikat) tidak diragukan lagi. Adapun faktor ditolaknya permohonan dispensasi para pemohon oleh majelis hakim, karena adanya perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) yaitu telah terjadi pernikahan di bawah umur antara anak pemohon I dan pemohon II sebelum mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Manna dikabulkan dengan berbagai pertimbangan Hakim terhadap alasan-alasan yang ditemukan pada fakta persidangan. Sedangkan dalam perkara dispensasi yang ditolak di Pengadilan Agama

Manna, dapat penulis simpulkan pertimbangan majelis hakim menolak permohonan dispensasi tersebut antara lain:

1. Pemohon tidak dapat menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan menghadirkan alat bukti (tidak cukup bukti) yang menguatkan alasan permohonan dispensasi kawin di persidangan.
2. Ditemukan pada fakta persidangan bahwa anak Pemohon telah dinikahkan oleh para pemohon dan dihadiri Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama sebelum perkara disidangkan.

Adapun faktor penyebab ditolaknya permohonan dispensasi kawin para pemohon oleh majelis hakim karena telah terjadinya pernikahan anak di bawah umur sebelum mendapatkan dispensasi Pengadilan Agama dan hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

2. Penetapan Pengadilan Agama Manna Nomor 0024/Pdt.P/2018/PA.Mna Berdasarkan Unsur Keadilan Hukum, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Hukum

Seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara, selain harus memperhatikan alasan-alasan dan dasarnya juga harus memeriksa perkara sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Dispensasi kawin di bawah umur merupakan sebuah wujud tindakan dari pemohon kepada hakim untuk memohon kebijakan atau dispensasi kepada pihak yang akan mengajukan dikarenakan akan melakukan pernikahan namun belum cukup umur sesuai syarat dan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu minimal usia perempuan 16 tahun sedangkan untuk calon pengantin laki-laki umur minimal 19 tahun.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai kesesuaian penetapan pengadilan berdasarkan unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum adalah:

a) Unsur Keadilan

Keadilan tidak hanya dapat dirumuskan secara matematis bahwa yang dinamakan adil bila seseorang mendapatkan bagian yang sama dengan orang lain. Karena keadilan sesungguhnya terdapat dibalik sesuatu yang tampak dalam angka tersebut (metafisis), terumus secara filosofis oleh penegak hukum yaitu hakim.

Mengenai unsur keadilan dalam penetapan pengadilan agama diketahui bahwa secara prosedural majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya telah memberikan penetapan sesuai dengan aturan yang ada, walaupun secara substansial memang akan sulit dirasakan keadilan bagi para pihak, tetapi pada duduk

²¹Hasil wawancara dengan Ibu Sudiliharti, S.H.I selaku hakim di Pengadilan Agama Manna, pada tanggal 10 April 2018

²²Hasil wawancara dengan Bapak Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I selaku hakim di Pengadilan Agama Manna, tanggal 11 April 2018

perkara anak pemohon telah dinikahkan ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemohon, oleh sebab itu majelis hakim menolak memberikan dispensasi untuk menegakkan keadilan prosedural guna terciptanya ketertiban pencatatan pernikahan.²³

Selain itu, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum menolak dispensasi kawin telah memberikan penetapan seadil-adilnya dan sesuai dengan aturan yang berlaku karena jika Majelis Hakim mengabulkan dispensasi tersebut sama saja dengan hakim tidak menegakkan hukum, karena mendukung pelanggaran Undang-Undang yang dilakukan oleh pemohon dan KUA.²⁴

Sesungguhnya konsep keadilan sangat sulit mencari tolak ukurnya karena adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan oleh pihak lainnya. Kata keadilan berasal dari kata adil, yang berarti dapat diterima secara obyektif.²⁵

Dalam suatu putusan yang cepat dan tepat terkandung keadilan yang bernilai lebih. Ketetapan putusan sesuai dengan hukum, kebenaran dan keadilan itu saja sudah mengandung nilai keadilan tersendiri, dan kecepatan penyelesaiannya dalam putusan yang cepat dan tepat terdapat rasa keadilan yang saling mengisi dalam penegakan hukum.²⁶

Adil pada hakekatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang. Oleh karena itu penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan dapat berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis, manakala memilih asas keadilan sebagai dasar memutuskan perkara yang dihadapi.

b) Unsur Kepastian

Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul

penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum.

Kepastian karena hukum dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu.²⁷

Mengenai unsur keadilan dalam penetapan pengadilan agama diketahui bahwa penolakan Dispensasi Kawin tersebut merupakan keputusan yang sudah pasti berlaku, karena dispensasi diberikan kepada anak yang belum cukup umur dan belum menikah, jika sudah menikah maka tidak perlu mengajukan dispensasi kawin.²⁸

Selain itu, penolakan dispensasi kawin tersebut merupakan keputusan yang sudah pasti berlaku, karena dispensasi diberikan kepada anak yang belum cukup umur dan belum menikah, jika sudah menikah maka tidak perlu mengajukan dispensasi kawin.²⁹

Kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum.³⁰ Apabila kepastian hukum diidentikkan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka hukum akan tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Oleh sebab itu dalam proses penegakan hukum perlu memperhatikan kenyataan hukum yang berlaku. Sehingga kepastian hukum dalam hal ini berguna untuk menciptakan ketertiban masyarakat.

c) Unsur Kebermanfaatan

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.

Mengenai unsur keadilan dalam penetapan pengadilan agama diketahui bahwa penolakan dispensasi kawin tersebut akan memberikan manfaat hukum, dapat menjadikan efek jera bagi masyarakat dan KUA yang menikahkan anak di bawah umur tanpa dispensasi dari pengadilan agama.³¹

²³Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I M.H selaku hakim di Pengadilan Agama Manna, tanggal 10 April 2018

²⁴Hasil wawancara dengan Bapak Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I selaku hakim di Pengadilan Agama Manna, tanggal 11 April 2018

²⁵Algra, dkk. Mula Hukum. (Jakarta: Binacipta, 1983), h. 7.

²⁶Romy Gumilar. Penyelesaian Perkara Dengan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan....., h. 2.

²⁷Syafruddin Kalo. Penegakan Hukum...., h. 4

²⁸Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I M.H selaku hakim di Pengadilan Agama Manna, tanggal 10 April 2018

²⁹Hasil wawancara dengan Bapak Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I selaku hakim di Pengadilan Agama Manna, tanggal 11 April 2018

³⁰Syafruddin Kalo. Penegakan Hukum...., h. 4

³¹Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I M.H selaku hakim di Pengadilan Agama Manna, tanggal 10 April 2018

Selain itu, penolakan dispensasi kawin tersebut akan memberikan manfaat hukum, dapat menjadikan efek jera bagi masyarakat dan KUA yang menikahkan anak di bawah umur tanpa dispensasi dari pengadilan Agama.³²

Putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan, manakalah hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarahkan pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya, hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak.³³

Pendapat hakim mengenai unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan dari penetapan yang hakim berikan kepada pemohon, bagi pemohon penetapan pengadilan agama Manna belum memenuhi unsur keadilan dan kepastian hukum karena dengan ditolaknya permohonan dispensasi kawin tersebut, anak pemohon I dan anak pemohon II belum bisa mendapatkan kutipan akta nikah (Buku Nikah) dari KUA, karena syarat dari KUA untuk mengambil buku nikah adalah dispensasi kawin dari Pengadilan Agama. Walaupun pemohon I dan pemohon II telah menikahkan anak pemohon I dan anak pemohon II dan anak pemohon I dan pemohon II sudah hidup layaknya suami istri yang sah tetapi belum mendapatkan kutipan akta nikah (buku nikah).³⁴

Menurut Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa, “hukum itu harus memenuhi berbagai karya sebagai nilai dasar dari hukum. Nilai dasar hukum tersebut adalah keadilan, kegunaan dan kepastian hukum.”³⁵ Sekalipun ketiga-tiganya itu merupakan nilai dasar dari hukum, namun antara mereka terdapat suatu ketegangan. Oleh karena ketiga-tiganya berisi tuntutan yang berlainan, sehingga mempunyai potensi untuk saling bertentangan.

Pertimbangan hakim menolak permohonan dispensasi nikah adalah karena kurangnya alat bukti yang menguatkan dalil permohonan para Pemohon. Dalam hal pemeriksaan alat bukti majelis hakim memeriksa alat bukti surat terlebih dahulu, karena alat bukti yang sudah diakui peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur dalam pasal 164 HIR, pasal 284 R. Bg dan pasal 1866 KUH Perdata sebagai beri-

kut:

- a. Alat bukti surat
- b. Alat bukti saksi
- c. Persangkaan
- d. Pengakuan
- e. sumpah

Apabila putusan tidak lengkap dan seksama mendiskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau on volldoendege motiveerd, dan putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 RBG. dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, kemudian di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, (sekarang pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009) yang menjadikan dasar menyatakan putusan mengandung cacat tidak cuup pertimbangan.

Pertimbangan Majelis Hakim, yang menyatakan bahwa satu orang saksi sehingga tidak dapat dianggap saksi (unus testis nulus testis) padahal dalam pembuktian Pemohon diharuskan menghadirkan minimal 2 (dua) orang saksi karena pada Pasal 169 HIR atau Pasal 1905 KUH Perdata yang berbunyi “keterangan seorang saksi tanpa ada alat bukti lain di dalam hukum tidak dipercaya”. Dalam HIR juga disebutkan pada Pasal 164, yaitu mengenai alat-alat bukti salah satunya adalah saksi. Dan dapat dirangkum dari Pasal 169-172 HIR dihubungkan dengan isi pasal 1905-1908 BW. tentang dasar kekuatan pembuktian dengan saksi:

- a. Keterangan dari seorang saksi saja, tanpa ada alat bukti yang lain tidak dianggap pembuktian yang cukup (pasal 169) HIR jo Pasal 1905 BW).
- b. Jika kesaksian berbagai orang mengenai berbagai peristiwa terlepas satu sama lainnya yang masing-masing berdiri sendiri tapi semua itu di dalam hubungannya satu sama lain menguatkan suatu peristiwa tertentu, maka terserah kepada hakim untuk menilainya sebagaimana dikehendaki oleh keadaan (Pasal 170 HIR jo Pasal 1906 BW).
- c. Pendapat-pendapat maupun perkiraan-perkiraan khusus yang diperoleh dari pemikiran bukanlah kesaksian. Oleh karena tiap-tiap kesaksian itu harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan (Pasal 171 HIR jo Pasal 1907 BW).
- d. Dalam mempertimbangkan suatu kesaksian atau nilai suatu kesaksian, hakim harus memberikan perhatian khusus pada persamaan kesaksian-kesaksian dengan apa yang diketahui dari lain sumber tentang hal yang menjadi perkara. Pada alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para saksi untuk mengutarakan perkaranya dan berba-

³²Hasil wawancara dengan Bapak Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I selaku hakim di Pengadilan Agama Manna, tanggal 11 April 2018

³³Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum Suatu Pengantar..., h. 160

³⁴Hasil wawancara dengan Halidi bin Saidi dan Biman bin Bamim selaku pemohon dispensasi pernikahan di Pengadilan Manna

³⁵Abdul Manan. Penerapan Hukum Acara..., h. 272-273

gai cara, baik pada cara hidup, kesusilaan adan kedudukan para saksi pada umumnya serta pada segala apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap lebih atau kurang dapat dipercayanya para saksi itu (Pasal 172 HIR jo Pasal 1908BW).

Proses pembuktian menjadi penting karena untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Pembuktian dalam dispensasi kawin tidak cukup dengan alat bukti tertulis tetapi juga dibutuhkan bukti dari 2 (dua) orang saksi untuk dapat menguatkan keterangan Pemohon, anak Pemohon untuk dapat membenarkan atau menguatkan dalil-dalil yang diajukan di muka sidang tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tertentu.

Hakim dilarang menetapkan suatu peristiwa sebagai terbukti hanya berdasarkan keterangan seorang saksi yang berdiri sendiri tanpa didukung alat bukti lainnya. Jadi, jika hanya satu orang saksi yang dihadirkan maka hakim belum bisa menilai, tetapi dengan adanya pengakuan Pemohon dan persangkaan oleh Hakim maka permohonan dispensasi kawin tersebut dapat ditetapkan.

Permohonan ditolak apabila jika suatu permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke pengadilan dan di depan sidang Pemohon tidak dapat mengajukan bukti tentang kebenaran dalil permohonannya, maka permohonan itu ditolak.³⁶ Hakim menimbang untuk menolak permohonan tersebut karena selain hanya menghadirkan satu orang saksi, keterangan saksi tersebut tidak menguatkan dalil permohonan Pemohon tetapi melemahkan dan dibenarkan/diakui oleh Pemohon di depan persidangan padahal yang diatur dalam persidangan saksi yang dihadirkan adalah saksi yang dapat menguatkan dalil permohonan. Oleh karena itu, permohonan dispensasi kawin Pemohon ditolak oleh Majelis Hakim.

Pertimbangan Hukum selanjutnya adalah pada dasarnya bukti P7 (Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I) dan P8 (Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon II) dan keterangan saksi, oleh karena itu belum memenuhi ketentuan Pasal 1 Ayat 1 sehingga Pemohon harus melaksanakan ketentuan Pasal 7 Ayat 2 Tahun 1974 sehingga dinilai patut apabila Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama menolak keinginan anak pemohon tersebut sesuai ketentuan Pasal 21 Ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, dan apabila tetap akan menikah, maka harus ada dispensasi nikah dari Pengadilan agama sesuai dengan Pasal 7

Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 15 Ayat (2) KHI.

Pada permohonan dispensasi kawin, Penolakan Pernikahan dari KUA setempat menjadi syarat utama untuk diperiksanya perkara tersebut. Dalam pengajuan dispensasi kawin Pemohon telah mendapatkan surat penolakan Nomor 005/KK.07.06.14/1/2018 tanggal 26 Januari 2018. Berdasarkan surat penolakan tersebut, para pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Manna dengan nomor register perkara 0024/Pdt.P/2018/PA.Mna tanggal 8 Februari 2018 yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:³⁷

- a. Bahwa, Para Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon I yang bernama Ropian Pranata bin Halidi dengan anak Pemohon II yang bernama Rinda Arsuci binti Biman;
- b. Bahwa, anak Pemohon I yang bernama Ropian Pranata bin Halidi baru berumur 18 tahun dan anak Pemohon II yang bernama Rinda Arsuci binti Biman kurang dari 16 tahun, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang laki-laki dan perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
- c. Bahwa, antara Ropian Pranata bin Halidi dengan Rinda Arsuci binti Biman tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
- d. Bahwa, antara Ropian Pranata bin Halidi dengan Rinda Arsuci binti Biman punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
- e. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);
- f. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan para Pemohon yang bernama Ropian Pranata bin Halidi dengan Rinda Arsuci binti Biman;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

³⁶Tim Penyusun, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, (Jakarta: Mahkamah Agung, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014), h. 116

³⁷Penetapan Pengadilan Agama Manna Nomor 0024/Pdt.P/2018/PA.Mna

Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana tertulis pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut prinsip bahwa calon suami maupun calon isteri harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan nikah agar supaya dapat diwujudkan tujuan nikah secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya nikah antara calon suami atau isteri di bawah umur.³⁸

Seperti yang tertuang di dalam Permen Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Bab III Pasal 5 poin g, bahwasanya dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon isteri yang belum mencapai umur 16 tahun. Oleh sebab itu, pihak KUA tidak bisa melangsungkan pernikahan anak di bawah umur.

Pada saat persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa semua syarat pernikahan telah dipenuhi, kecuali syarat umur tersebut, dan bahkan berdasarkan keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon, calon suami telah memiliki pekerjaan sebagai petani dan siap bertanggungjawab terhadap kehidupan rumah tangganya dan calon istrinya juga siap menjadi ibu rumah tangga, dan alasan utama para pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, pernikahan tersebut mendesak untuk dilaksanakan dan tidak dapat ditunda lagi karena calon istri telah hamil 2 (dua) bulan, tetapi keadaan tersebut tidak menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi tersebut, karena ternyata di fakta hukum, berdasarkan keterangan saksi dan dibenarkan oleh para pemohon bahwa benar, pernikahan anak para pemohon telah dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2018 sebelum perkara permohonan dispensasi disidangkan dan perkara belum ditetapkan oleh Majelis Hakim untuk diberikan dispensasi kepada para pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon.³⁹

Berdasarkan uraian di atas, secara lisan para pemohon tetap pada permohonannya untuk dapat diberikan dispensasi oleh Pengadilan Agama padahal pernikahan telah terjadi. Berdasarkan hal tersebut, hakim memberikan pertimbangan, bahwa pernikahan yang dilaksanakan sebelum dispensasi perkawinan diberikan oleh Pengadilan Agama bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Setelah membaca duduk perkara di atas dan mempelajari berkas dispensasi pernikahan di Penga-

dilan Agama Manna dengan mencermati argumentasi-argumentasi, bukti-bukti, dan berkas yang ditunjukkan oleh pihak pemohon serta pertimbangan hukum yang diperoleh melalui Pengadilan Agama Manna, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak.

Bahwasanya umur anak pemohon belum mencukupi ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan para Pemohon telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (2) yang tidak meminta dispensasi kawin ke Pengadilan sebelum menikahkan anak Pemohon. Seharusnya Pemohon bisa menikahkan anak Pemohon setelah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama yang berupa Penetapan resmi dari Pengadilan Agama setelah semua prosedur pelaksanaan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama selesai.

Hukum memuat suatu peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan yang mewujudkan perintah dan larangan. Dimana dalam suatu putusan atau penetapan terulang dalam suatu pertimbangan hukum, pertimbangan hukum adalah sebagai acuan untuk memberikan kejelasan bagi pihak yang berperkara, tentang putusan atau penetapan yang diambil baik bentuk diterima, ditolak maupun bentuk putusan lainnya.

Pihak KUA juga seharusnya juga bisa lebih tegas dalam menolak menikahkan pasangan di bawah umur karena pihak KUA tidak ada wewenang menikahkan pasangan suami istri yang masih dibawah umur, kecuali ada dispensasi dari pengadilan. Bentuk ketegasan itu, juga tidak hanya dengan mengeluarkan surat penolakan pernikahan tetapi juga melakukan pencegahan pernikahan tersebut.

Permen Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dalam Bab IV Pasal 8, menyatakan "Apabila seorang calon suami belum mencapai 19 tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 16, harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan. Kemudian dalam Bab VI Pasal 12 angka 4 menyatakan "Apabila pengadilan memutuskan atau menetapkan bahwa pernikahan dapat dilaksanakan, maka PPN diharuskan mengizinkan pernikahan tersebut dilaksanakan. Jadi, dari peraturan di atas bahwa sudah jelas, pernikahan hanya dapat dilaksanakan oleh PPN setelah ada penetapan dari Pengadilan. Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:

"Pegawai Pencatat Perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui ada pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-Undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

³⁸Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.selaku hakim Pengadilan Agama Manna tanggal 11 April 2018

³⁹Hasil wawancara dengan Bapak Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I. selaku hakim Pengadilan Agama Manna tanggal 11 April 2018

Berdasarkan pendapat di atas, disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pegawai KUA tersebut merupakan pelanggaran atas ketentuan Pasal 7 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena walaupun keadaan calon istri yang sudah hamil tidak bisa menjadi alasan dalam menikahkan pasangan tersebut karena calon pengantin masih belum cukup umur sehingga secara hukum positif di Indonesia harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama. Pegawai KUA seharusnya memberikan pencegahan perkawinan dengan memberikan penolakan pernikahan, tidak melangsungkan atau membantu melangsungkan pernikahan, sesuai ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 15 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Pernikahan.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dapat jelas bahwa faktor penyebab permohonan dispensasi kawin ditolak karena terdapat perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perbuatan tersebut berupa pelanggaran ketentuan Undang-Undang oleh para pemohon yang menikahkan anak pemohon yang masih belum cukup umur serta dibantu oleh petugas KUA setempat untuk melangsungkan pernikahan tanpa mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Adapun upaya hukum bagi yang ditolak permohonan dispensasi usia perkawinan perkara Nomor 0024/Pdt.P/2018/PA.Mna ada upaya hukum yang dilakukan pemohon untuk menuntut haknya, yaitu:

1. Memperbaiki permohonan

Dalam hal ini permohonan dispensasi usia perkawinan yang ditolak harus memperbaiki permohonan dimana permohonan tersebut harus sama dengan pembuktian dalam persidangan, sehingga hakim dapat menetapkan dispensasi usia perkawinan sesuai dengan hukum yang berlaku. Setelah perbaikan permohonan selesai, pemohon dapat mengajukan permohonan ulang di Pengadilan Agama.

2. Kasasi

Kasasi artinya pembatalan putusan oleh Mahkamah Agung. Pengadilan kasasi adalah Pengadilan yang memeriksa apakah *judex factie* tidak salah dalam melaksanakan peradilan. Upaya Hukum Kasasi adalah upaya agar putusan *judex factie* dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena salah dalam melaksanakan peradilan.

Kasasi ialah pembatalan atas keputusan Pengadilan-pengadilan yang dilakukan pada tingkat peradilan terakhir dan dimana menetapkan perbuatan Pengadilan-pengadilan dan para hakim yang bertentangan dengan hukum. Kasasi adalah upaya hukum permohonan apabila pemohon tidak puas dengan penetapan di tingkat pertama. Kasasi merupakan upaya hukum terakhir.⁴⁰

Dalam hal ini, pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan atau penetapan Pengadilan Agama (dalam permohonan *voluntair*), dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. pemohon yang ditolak permohonan dispensasi usia perkawinan di tingkat pertama Pengadilan Agama, pemohon berhak mengajukan kasasi penetapan Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung dalam hal permohonan dispensasi usia perkawinan dengan syarat-syarat pengajuan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.⁴¹

Pemohon yang ditolak permohonan dispensasi usia perkawinan di tingkat pertama Pengadilan Agama, pemohon berhak mengajukan kasasi penetapan Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung dalam hal permohonan dispensasi usia perkawinan dengan syarat-syarat pengajuan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

Upaya hukum yang akan dilakukan oleh pemohon dalam mengambil langkah ketika penetapan hakim menolak pemberian dispensasi pernikahan, yaitu pemohon I dan pemohon II belum melakukan upaya hukum tetapi pemohon I dan pemohon II akan mengarahkan anak pemohon I dan pemohon II untuk mengajukan permohonan pengesahan pernikahan/ isbat nikah ke pengadilan agama apabila nantinya diperlukan buku nikah untuk administrasi keluarga.⁴²

Perkara 0024/Pdt.P/2018/PA.Mna yang ditolak pertimbangan Hakim telah jelas dan sesuai secara yuridis karena telah sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia. Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa, pengakuan pemohon di depan persidangan itu sempurna (mengikat) dan tidak diragukan lagi, dan permohonan ditolak karena pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya dan patut untuk ditolak, sedangkan permohonan dikabulkan apabila pemohon bisa membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Perkara 0024/Pdt.P/2018/PA.Mna yang ditolak pertimbangan Hakim telah jelas dan sesuai secara yuridis karena telah sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia. Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa, pengakuan pemohon di depan persidangan itu sempurna (mengikat) dan tidak diragukan lagi, dan permohonan ditolak karena pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya dan patut untuk ditolak, sedangkan permohonan dikabulkan apabila pemohon bisa membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Kesimpulan

1. Pertimbangan Hukum dalam menolak permohonan dispensasi kawin pada perkara Nomor 0024/Pdt.P/2018/PA.Mna karena para pemohon hanya dapat menghadirkan 1 (satu) orang saksi sehingga tidak dapat membuktikan dalil permohonannya dan pada persidangan ditemukan fakta hukum

⁴⁰Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Pusat Belajar, Yogyakarta, 2008), h 292.

⁴¹Hasil Wawancara dengan Bapak Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I selaku hakim Pengadilan Agama Manna, pada tanggal 11 April 2018.

⁴²Hasil wawancara dengan Halidi bin Saidi dan Biman bin Bamim selaku pemohon dispensasi pernikahan di Pengadilan Manna

bahwa anak para pemohon telah dinikahkan sebelum perkara dispensasi kawin disidangkan di Pengadilan Agama Manna. Penyebab permohonan dispensasi kawin ditolak pada Penetapan Pengadilan Agama Manna Nomor 0024/Pdt.P/2018/PA.Mna bahwa karena adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

2. Penetapan Pengadilan Agama Manna Nomor 0024/Pdt.P/2018/PA.Mna sudah berdasarkan kesesuaian unsur keadilan Hukum, kepastian Hukum dan kemanfaatan hukum. Unsur kemanfaatan penolakan dispensasi kawin tersebut akan memberikan manfaat hukum, dapat menjadikan efek jera bagi masyarakat dan KUA yang menikahkan anak di bawah umur tanpa dispensasi dari pengadilan Agama. unsur keadilan hukum, secara prosedural pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan aturan yang ada, walaupun secara substansial memang akan sulit dirasakan keadilan bagi para pihak pemohon, hakim menolak memberikan dispensasi untuk menegakkan keadilan prosedural guna terciptanya ketertiban pencatatan pernikahan. Kemudian pada unsur kepastian hukum, dispensasi diberikan kepada anak yang belum cukup umur dan belum menikah, jika sudah menikah maka tidak perlu mengajukan dispensasi kawin.

Daftar Pustaka

- Al Asqolani, Ibnu Hajar. Fathul Ba'an, Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhori jilid 15. Jakarta: pustaka Azzam. 2006.
- Al-Hamdani, H.S.A. Risalah Nikah, Terjemah Agus Salim. Jakarta: Pustaka Amani. 2002.
- Al-Syir'ah. Jurnal Syariah dan Hukum. Jurusan Syariah STAIN Manado. 2012
- Andrianto, Tuhana Taufiq. Romantika Perkawinan di Era Digital Tinjauan secara Islami. Yogyakarta: Pustaka Mahendra, 2013
- Asti, Badiatul Muchlisin. Datangilah Istrimu sesuai Kehendakmu. Jakarta: PT. Buku Seru, 2013
- Andiko, Toha. Fiqih Kontemporer. Bogor: IPB Press. 2014
- Arikunto, Suharsini. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi). Jakarta : PT. Rineka Cipta. 2006.
- Arto, Mukti. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007
- Dahwal, Sirman. 2017. Perbandingan Hukum Perkawinan. Bandung: Mandar Maju
- Darajat, Zakiah, dkk. Ilmu Fiqh. Jakarta, Depag RI. 2008.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 1995.
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. Bahan Penyuluhan Hukum. Jakarta: Departemen Agama RI. 2001.
- Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: CV. Mandar Maju. 2007.
- Hadiyanto, Firman. Dispensasi Nikah Dengan Pemeriksaan Setempat (Studi Analisis Perkara No. 079/pdt.P/PA.BL. tentang Dispensasi NiKah". Skripsi Sarjana. STAIN: Ponorogo. 2010.
- Hakim, Rahmat. Hukum Perkawinan Islam. Bandung: Balai Pustaka. 2010.
- Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: CV. Mandar Maju. 2007.
- Husen, Muhammad. Fikih Perempuan Refleksi Kyai Atas Agama dan Gender. Yogyakarta: LKIS. 2000.
- Idris, Abdul Fatah dan Ahmadi, Abu. Fikih Islam Lengkap. Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Ismail, Aulia. Pandangan hakim pengadilan agama kabupaten trenggalek tentang penerapan dispensasi kawin dalam buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi (Buku II). Skripsi Sarjana, STAIN, Ponorogo. 2014.
- Maman. Metodologi Penelitian Agama: Teori dan Praktik. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2006.
- Manan, Abdul. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kecana. 2006.
- Maulidia, Rahma. Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia (KHI). Ponorogo: STAIN Po Press. 2011.
- Margono. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Moh. Rifai, Rosihin Abdul Ghoni. Al-Qur'an & Terjemahnya Lengkap dengan Transliterasi Arab Latin, Terj. Mazmur Sya'roni, H.M. Shohib Tahar. Semarang: Wicaksono. 1999.
- Mujieab, M. Abdul. Kamus Istilah Fiqih. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1994.
- Mugniyah, M. Jawad. Fiqh Lima Madzhab, Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafii, Hambali (ttp:lentera). 2000.

